

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bosu, B. (1997). *Perkembangan Terbaru Sertifikat (Tanah, Tanggungan, dan Condominium)*. Jakarta: Mediatama Saptakarya.
- Djodjodirdjo, M. A. M. (2000). *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Fuady, M. (2013). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. (2014). *Konsep Hukum Perdata (1 ed.)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hanitijo Soemitro, R. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Hardjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Harsono, B. (2016). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrari, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Hermit, H. (2004). *Cara memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara Dan Tanah Pemda*. Bandung: Mandar Maju.
- HS, S. (2008). *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutagalung, A. S. (2005). *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
- Hyronimus, R. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Universitas Atma Jaya.
- M. Hadjon, P. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- M. Manullang, F. (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai)*. Buku Kompas.
- Mertokusumo, S. (1998). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2010). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis. (2008). *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- Parlindungan, A. P. (1998). *Pendaftaran Tanah dan Konfersi Hak Milik Atas Tanah*

Menurut UUPA. Bandung: Alumni.

Prodjodikoro, W. (1992). *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur.

_____. (2000). *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Yogyakarta: Mandar Maju.

Santoso, U. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah* (Edisi Pert). Jakarta: Kencana.

_____. (2012). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.

_____. (2016). *Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*. Jakarta: Kencana.

Sjahdjeini, S. R. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Soemitro, R. H. (1985). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sumarja, F. (2010). *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Sutedi, A. (2011). *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syahputra, A. (2012). *Buku Perdata Indonesia Jilid 2*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

Tehupeiory, A. (2012). *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia* (1 ed.). Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).

Thalib, H. (2012). *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*. Jakarta: Kencana Media Prenada Group.

Yazid, F. (2020). *Pengantar Hukum Agraria* (1 ed.). Medan: Undhar Press.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

C. SUMBER LAIN

- Adhya Wastika Susanto, I. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Di Batalkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung Dikaitkan Dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negar*. Universitas Pasundan.
- Anggono, S. (2019). Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali). *Dinamika Hukum*, 10(1), 203–217.
- Burhanuddin, S. F. (2021). Analysis of Notary Deed as a Basic Reference to Evidence in Civil Law. *Legal Brief*, 10(2), 280–286.
- Dwi Ramdhani, W. (2020). *Keabsahan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Tanpa Sepengetahuan Pemiliknya Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. Universitas Pasundan.
- Eric Hamenda, B., N. Mamahit, G., & F. Aling, D. (2021). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Yang Disebabkan Oleh Penerbitan Sertifikat Yang Cacat Hukum. *Lex Administratum, Vol. 9 No.*, Hlm. 197.
- Glosarium. (2014). *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>
- Khairina. (2014). Sertifikat Cacat Hukum dalam Hukum Pertanahan di Indonesia. *Juris*, 13(1).
- Masya Kusumanegara, G. (1995). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sertifikat Yang Mengandung Cacat Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pada Kantor Pertanahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung*. Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Putri Lesmana, L. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Pemohon Terhadap Proses Pemecahan Hak Atas Tanah Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. Universitas Pasundan.
- Raharjo, S. (1999). Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah. *Jurnal Masalah Hukum*.
- Ramdhan, A. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Yang dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Tidak Disampaikan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Peraturan*

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Universitas Pasundan.

- Rohim, A., & Romadhoni, A. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Sebidang Tanah Yang Telah Mencapai Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Perkara Nomor. 19/Pdt.G/2019/PN.KRS). *JUSTNESS Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol.01(02), 1–28. <https://ejournal.stihzainulhasan.ac.id/index.php/justness/article/view/6>
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 54–55. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>
- Setyo Putri, A. B. (2017). Itikad Baik Pada Pendaftaran Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1), 12–21. <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1726>
- Siahaan, K. I. (2015). Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Akibat Dikeluarkannya Sertipikat Ganda Yang Mengandung Cacat Hukum Administrasi (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.